



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 854/III/2015

III/MARET 2015



Dewan Minta Tunda Larangan Penggunaan *Trawl*



Dewan Minta Tunda Larangan Penggunaan *Trawl*



Suasana Diskusi Forum Legislasi di Press Room DPR

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti untuk menunda pelaksanaan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 1 dan 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan pukat hela (*trawl*), Permen Nomor 56 dan 57 Tahun 2014 dan kapal-kapal nelayan yang dianggap ilegal tidak perlu dibakar, melainkan disita oleh negara dan dihibahkan kepada nelayan. Kecuali, jika kapalnya sudah tua, maka sebaiknya ditenggelamkan. Harus diakui jika para nelayan itu masih miskin dan sulit, sehingga membutuhkan pengayoman pemerintah.

“Saya minta Ibu Menteri Susi Pudjiastuti menunda pelaksanaan Permen-Permen yang untuk sementara ini mendapat penolakan dari masyarakat nelayan. Seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu sebelum diterapkan. Kalau terjadi penolakan, berarti ke depan pemerintah dan DPR harus melakukan sistem perencanaan an-

tara pusat dan daerah,” tegas Herman Khaeron saat diskusi forum legislasi “RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan” bersama Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Mayjen. Pur. Yussuf Solichien dan Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB yang juga Penasihat Menteri KKP Arif Satria di Press Room Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Fraksi Demokrat ini, RUU ini masuk dalam RUU Prioritas 2015 yang akan diselesaikan pada masa persidangan 2015 ini. RUU ini meliputi ruang lingkup perikanan, nelayan, budi daya rumput laut, dan berbagai aspek kelautan, perikanan dan nelayan, sehingga pembahasan dan perumusannya harus melibatkan stakeholder, pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun masyarakat.

“RUU ini semata-mata agar negara hadir. Misalnya memberikan perlindungan di sektor harga, advokasi,

pendampingan terhadap nelayan dan berbagai aspek yang bebrbatasan dengan laut,” ujarnya.

Selain itu kata Herman, ada aspek pendidikan, penyuluhan untuk 40 ribu desa nelayan dan pesisir, memberikan akses permodalan kepada perbankan sebagai lembaga keuangan mikro bank sebagai mitra kerja yang baik tanpa payung hukum dan sebagainya. Sistem pasar juga harus diciptakan, infrastruktur dibereskan dan memberikan keleluasaan kepada nelayan bahwa nelayan itu mempunyai prospek masa depan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dengan begitu tegas Herman, agar nelayan benar-benar dilindungi, diberdayakan dan disejahterakan. Karenanya visi RUU ini adalah untuk kesejahteraan sekaligus sebagai payung hukum dalam melindungi dan memberdayakan nelayan.

“DPR akan mengundang Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan akses keuangan guna pembiayaan nelayan itu,” tambahnya.

Apalagi, kondisi sosial ekonomi nelayan Indonesia dari 2,17 juta nelayan sebanyak 1,4 juta (kepala rumah tangga), ada di 3.216 desa, 70% berpendidikan SD, dan hanya 1,3 % yang berpendidikan tinggi, dan upah mereka rata-rata Rp 1,1 juta per bulan. Karena itu tujuan RUU ini untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian nelayan, pembudi daya ikan dan hasil laut lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik. “Maka, RUU ini untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan, melindungi nelayan dan fluktuasi harga, praktek ekonomi dan resiko usaha, dan menumbuhk-

bangkan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha perikanan,” mantapnya.

Sementara Yussuf Solichien mengakui jika kebijakan Menteri Susi tersebut tak pernah melibatkan pihak-pihak terkait (*stakeholder*). Tidak dilandasi ideologi negara yang mengharuskan dilakukan dengan musyawarah, menciptakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bersama.

Padahal kata Yussuf, kalau mau nelayan itu mandiri dan berdaulat maka harus disubsidi seperti di Cina (40%), Amerika Serikat (50%), Jepang (40%) dan negara lain. Negara-negara maju itu peduli pada nelayan, sehingga Cina mampu mengekspor ikan sebanyak 52 juta ton/tahun. “Jadi, pencurian ikan atau *illegal fishing*, pun tak akan pernah berhasil tanpa melibatkan nelayan, maka nelayan perlu diberdayakan,” ungkapnya.

Menurut Yussuf, satu-satunya solusi adalah memberi subsidi kepada nelayan yang menguasai 5,28 juta km luas laut Indonesia, ditambah penegakan hukum dengan melibatkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Angkatan Laut, mendirikan Bulog Perikanan. Sebab, dengan suhu di bawah 20 derajat ikan mampu bertahan sampai 2 tahun.

Selain itu dia meminta pemerintah tidak menggunakan data yang salah, sebab hal itu akan mengakibatkan terjadinya kebijakan yang juga salah. Data BPS sebagai data terbaru hasil sensus bahwa jumlah nelayan itu sebanyak 927 ribu sedangkan menurut DPR dan HNSI sebanyak 2,7 juta nelayan.

HNSI juga merilis sebanyak 72 % nelayan tidak sekolah dan tidak pula mempunyai akses ke perbankan dan lain-lain. “Bagaimana menghadapi globalisasi ekonomi termasuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)? Karena itu, perlu revisi semua kebijakan menteri Susi tersebut,” tambahnya.

Sedangkan Arif Satria berpendapat

kalau pulau-pulau itu ada nelayan maka kapal asing akan takut memasuki wilayah laut Indonesia. Sebaliknya, kalau kosong, maka asing akan bebas masuk. Sebab itu dia sepakat untuk melindungi nelayan yang meliputi kehidupan, kesehatan, pendidikan, pangan dan perumahan.

“Juga perlu perbaikan alat tangkap ikan, dan perlindungan seperti apa yang harus diberikan kepada negara (koperasi), perlindungan perubahan iklim di mana terdapat 226 desa yang harus direhabilitasi, dan 784 desa yang rawan tsunami,” ungkapnya.

Dikatakannya, jika eksploitasi laut kita sangat kritis. Produksi di tingkat hulu hanya 50 persen. Karena itu, kalau semua dibiarkan maka akan terjadi degradasi alam. Salah satu degradasi alam itu adalah makin kecilnya ukuran ikan. “Lama-kelamaan ikan akan hilang seperti yang terjadi di Timur Tengah, Thailand dan Vietnam,” pungkasnya.

(sc/nt) foto: andri/parle/hr

DPR Dukung Gelaran Turnamen Presiden Cup



Ketua DPR RI didampingi Pimpinan dan Anggota Komisi X menerima PB Pertamina

Dewan Perwakilan Rakyat mendukung rencana Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) untuk menggelar turnamen Presiden Cup pada April 2015 mendatang. Apalagi, agenda internasional yang sudah digelar sejak tahun 1970-an itu, selama ini vakum.

Demikian dikatakan Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya, usai per-

temuan dengan Ketua DPR RI Setya Novanto dan Ketua Umum PB Pertamina A Reza Ali, di Gedung Nusantara III, Selasa (10/03/15).

“Saya sebagai Ketua Komisi X DPR RI mendukung rencana Pertina menggelar turnamen Presiden Cup ke-22 bulan April mendatang. Gelaran ini menjadi tanggung jawab kita bersama

baik DPR, Pemerintah dan *stakeholder* lain,” kata Riefky.

Politisi asal Dapil Aceh I ini berharap, Pemerintah dapat turun tangan untuk membantu persiapan turnamen yang akan mengundang atlet dari 25 negara. Mengingat, gelaran ini merupakan sebuah kebanggaan bagi Indonesia di dunia internasional, sehingga turut berpengaruh terhadap citra Indonesia.

“Kita harapkan pemerintah turun tangan membantu persiapan akbar ini karena masih banyak kendala, dan waktu tinggal 1 bulan lagi. Ini adalah etalase bangsa kita dalam menggelar kegiatan olahraga internasional,” tambah politisi Partai Demokrat itu.

Selain itu, tambah Riefky, gelaran ini diharapkan juga mampu meningkatkan pariwisata dan meningkatkan citra Indonesia, khususnya di bidang tinju. Ketika ditanyakan terkait pembinaan atlet tinju yang terkesan mandek, Riefky mengakui hal tersebut.

“Namun kita tidak boleh putus asa, karena 2-3 tahun terakhir, kepengurusan Pertina sudah mencetak 3-4 ribu atlet tinju, yang sebelumnya hanya

beberapa ratus atlet tinju. Apalagi, Pertina juga terus melakukan konsolidasi hingga tingkat provinsi, kabupaten dan kota,” imbuhnya.

Ia juga berharap, olahraga yang pernah berjaya di era 70-an ini dapat bangkit lagi, dan membawa kembali nama bangsa di internasional. Apalagi, sudah banyak sekali atlet-atlet kita yang berhasil merebut kemenangan atau rangking teratas di berbagai kejuaraan dunia,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PB Pertina A Reza Ali menyatakan, pihaknya sedang berupaya untuk mengembalikan kejayaan tinju

nasional, melalui pembinaan dan pelatihan, sehingga prestasi dunia dapat diraih. Apalagi, kompetisi setahun tidak hanya sekali, tapi enam kali.

“Kita tidak banyak menuntut, tapi sekarang pengembangannya luar biasa, baik konsolidasi maupun jumlah petinju yang sudah hampir ada di seluruh provinsi dan daerah. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami juga sudah siap membuktikan kemampuan kita di Presiden Cup yang ke-22 nanti. Apalagi, kita hanya baru sekali meraih juara umum,” jelas Reza.

Reza menambahkan, saat ini perangkat tinju, seperti pelatih dan wasit

sudah sangat sedikit. Bahkan, hampir punah. Untuk itu, ia meminta seluruh pihak yang berkepentingan harus meningkatkan perangkat tinju, termasuk pelatih dan wasit, baik melalui pergantian maupun penambahan jumlahnya.

“Bagaimana kita bisa mengawal tim di even internasional. Kita tidak punya wasit, kita dipermainkan orang lain. Tapi kami yakin arah perjuangan untuk mengembalikan kejayaan tinju mulai mendekat, tidak ada masalah lagi, infrastruktur sudah bagus. Tidak ada kesulitan utk mengembangkan, tinggal selektif aja,” pungkasnya. (sf) foto: *denus/parle/hr*

Armenia Undang DPR Hadiri Peringatan 100 Tahun Genocida



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Dubes Armenia

Presiden Armenia lewat Duta Bearnanya di Jakarta menyampaikan undangan resmi kepada Pimpinan DPR untuk menghadiri peringatan 100 tahun peristiwa genocida yang pernah terjadi di Armenia. Pimpinan DPR diharapkan hadir dalam pertemuan penting, akhir April nanti.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan hal tersebut usai menerima Dubes Armenia untuk Indonesia Anna Aghadjanian di ruang kerjanya,

Jumat (13/3). “Saya menerima Dubes Armenia. Beliau menyampaikan undangan untuk peringatan 100 tahun genocida yang terjadi di Armenia pada tahun 1915. Dan undangan itu datang dari Presiden Armenia untuk akhir April. Diharapkan kami dari parlemen hadir,” jelas Fadli.

Tidak sekadar peringatan, undangan tersebut juga sekaligus untuk menghadiri konferensi genocida dengan dihadiri para kepala negara dan

pemerintahan dari seluruh dunia. Peristiwa genocida di Armenia tepatnya terjadi pada 24 April 1915. Ini adalah episode gelap saat warga Armenia dipaksa eksodus dari tanah kelahirannya oleh Imperium Turki Utsmani. Mereka menyebar ke 195 negara hingga kini.

Imperium Utsmani menguasai Armenia sekitar tahun 1300-1923 dengan mencaplok sebagian wilayah Armenia. Turki Utsmani mulai masuk ke Armenia dengan pertempuran di Sisilia tahun 1071. Dan puncak genocida itu terjadi pada 24 April 1915 dengan pembantaian nyawa orang-orang sipil oleh tentara Turki.

Menurut Fadli, kehadiran DPR sangat penting. “Ini untuk menunjukkan hubungan baik kedua negara dan peringatan ini sangat penting, karena genocida terbesar di awal abad ke-20 itu terjadi di Armenia. Saya kira perlu kita tunjukkan sikap menghormati dan simpati agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi.” (mh) foto: *iwan armanias/parle/hr*



Perlu Manage *Capital Account* Hadapi Pelemahan Rupiah



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Rupiah terus melemah hingga mencapai Rp13 ribu. Pengaruh global selalu mempengaruhi kondisi rupiah di dalam

negari. Untuk mengantisipasi terus melemahnya rupiah perlu pula dipertimbangkan solusi *manage capital account* oleh pemerintah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di DPR, Jumat (13/3). Fadli berharap rupiah tidak terus melemah di masa mendatang. Bila melemah hingga mencapai Rp15 ribu itu sudah memberatkan bagi pembangunan di dalam negeri. Apalagi bila pemerintah sangat bergantung kepada bahan baku impor untuk menjalani program pembangunannya.

“Ya mudah-mudahan tidak terjadi sampai Rp15 ribu. Saya kira dengan Rp13 ribu saja sangat memberatkan. Untuk membangun itu kita perlu bahan baku impor. Kalau ini berkelanjutan saya kira bisa berhenti membangun kalau ada ketergantungan pada bahan-bahan impor dari luar,” ujar Fadli.

Pemerintah dan BI, harap Fadli, harus berusaha keras mengantisipasi semua faktor pelemahan rupiah yang berkepanjangan. “Harus ada pengetatan dan pertimbangan dari sisi regulasi. Mungkin perlu dipertimbangan *manage capital account*. Ini diperlukan sehingga rupiah tidak floating bebas seperti sekarang ini. (mh) foto: iwan armanias/parle/hr

Komisi III Prihatin, Rumah Hakim Tidak Layak

Dalam kunjungan ke Pengadilan Negeri Tuban dan Bojonegoro, anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menemukan fakta sejumlah rumah dinas hakim dalam kondisi rusak, tidak layak. Ia meminta pemerintah serius memikirkan solusi permasalahan ini, agar kinerja hakim yang bekerja di daerah tetap terjaga profesionalitasnya.

“Permasalahan yang saya temukan baik PN Tuban maupun PN Bojonegoro relatif sama rumah hakim yang kondisinya memprihatinkan dan perlu perbaikan segera. Para hakim ini kan harapan utama masyarakat dalam mencari keadilan di daerah, jangan sampai negara lalai memperhatikan mereka,” tandas dia saat dihubungi di Jakarta, Senin (9/3/15).

Masukan lain yang diterima politisi Fraksi Partai Demokrat ini dalam kunjungan tersebut adalah terbatasnya jumlah tenaga kerja administrasi di pengadilan. Akibatnya para hakim dan panitera terpaksa turun tangan membantu.

“Iya akhirnya hakim dan panitera bekerja multifungsi, kelihatannya mungkin tidak terlalu jadi persoalan tetapi dalam rangka profesionalitas kerja mendukung hakim untuk konsentrasi pada perkara yang ditanganinya seharusnya ini tidak boleh terjadi. Jadi tenaga administrasi harus ditambah,” papar dia.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jatim IX ini pada kesempatan kunjungan juga berdialog dengan para hakim



Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto

dan karyawan. Menurutnya seluruh permasalahan dan masukan yang diperoleh akan disampaikan dalam rapat kerja dengan pemerintah serta rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung. (iky) foto: iwan armanias/parle/hr

Pegawai Lapas Kurang, Kinerja Terganggu

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai kebijakan pemerintah melakukan moratorium penerimaan pegawai di sejumlah instansi pemerintah tidak sepenuhnya positif. Di Lapas Bojonegoro misalnya kinerja pembinaan narapidana bisa terganggu karena kekurangan pegawai.

“Saya mendapat laporan disini banyak PNS yang sudah memasuki masa pensiun. Akibat kebijakan moratorium Menpan RB pegawai yang pensiun belum ada penggantinya. Nah kekurangan sdm disini bisa memperlemah kinerja lembaga dalam melakukan pembinaan narapidana, ini serius kan,” katanya dalam keterangan pers kepada wartawan di Jakarta Senin (9/3/15).

Politisi Partai Demokrat ini melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi dalam masa reses di daerah pemilihannya Jatim IX. Temuan lain di Lapas Bojonegoro adalah jumlah warga binaan yang sudah melebihi kapasitas seharusnya. Ia menyarankan kementerian dapat mengambil kebijakan relokasi dari lapas yang padat ke lapas yang masih kekurangan penghuni.

Solusi lain mengatasi *over capacity* ini menurut Didik adalah membuat



Suasana rapat Komisi III DPR dengan MenkumHam

bangunan baru, apalagi Lapas Bojonegoro mempunyai aset tanah seluas 5,2 hektar yang siap untuk dibangun. Ia menyebut akan membantu memperjuangkan anggarannya dalam rapat kerja dengan Menkumham.

Secara khusus ia juga menyampaikan

apresiasi karena manajemen Lapas sudah berhasil menerapkan perangkat teknologi informasi dalam melayani masyarakat yang datang berkunjung. “Saya lihat perangkat IT yang digunakan juga cukup baik,” ujar dia. (iky) foto: andri/parle/hr

Pemberian Bantuan Untuk Daerah Terpencil Perlu Perhatian Khusus



Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Syafi'i

Pemberian bantuan untuk daerah terpencil dan perbatasan harus mendapat perhatian khusus. Karena selama ini memang daerah perbatasan dan suku terasing jarang mendapat kunjungan sehingga data-data orang miskin tidak ada.

“Yang saya amati, aparat tidak mau mengunjungi daerah-daerah terpencil dan pedalaman. Akibatnya data tidak ada sehingga bantuanpun tidak disalurkan, dan ada warga yang meninggal karena kelaparan. Ini jelas tidak kita harapkan,” tandas anggota Komisi VIII DPR Muhammad Syafi'i saat dihubungi, Selasa (10/3).

Hal itu dikatakannya sehubungan meninggalnya 11 orang suku anak dalam Jambi dalam tiga bulan terakhir. Mereka tinggal di hutan penyangga belahan timur Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) Sarolangon, Jambi, diduga karena kelaparan dan penyakit.

Menurut politisi Gerindra ini, dalam beberapa kali rapat kerja dengan Kemensos dan Kemenkes, pihaknya meminta

agar validasi data orang-orang yang layak mendapatkan anggaran (bantuan) harus terus di *update*. “ Sesuai UU validasi data itu minimal di *update* dua tahun sekali. Mereka tidak didata tetapi dipanggil ke kelurahan untuk menerima bantuan secara tiba-tiba,” ungkapnya.

Bahkan lanjutnya, data yang digunakan Kemensos untuk pemberian bantuan sekarang, menggunakan data tahun 2011. “ Ini sudah melanggar Undang-Undang, kalau datanya saja sudah salah, pasti penyaluran bantuannya tidak tepat,” tegas politisi asal Sumut ini.

Ia menekankan kembali, jika masih terjadi validasi data yang tidak benar, maka akan menyebabkan penyaluran bantuan yang tidak benar juga. Penyaluran bantuan harus membuat mereka lebih mandiri, sehingga jika bantuan telah

diberikan dan diterima harus ada pengawasan, monitoring dan evaluasi apakah bantuan itu menjadi pembawa perubahan, kemiskinan menjadi berkurang ataukah menjadi bertambah miskin.

Ke depan, ia berharap validasi data berdasarkan undang-undang dengan tenggang waktu dua tahun sekali, sehingga kecil kemungkinan nanti warga kita tidak terdata dan tidak mendapatkan bantuan. Ketika ditanyakan apakah Komisi VIII bisa mengagendakan kunjungan ke suku-suku terpencil di pedalaman, tokoh masyarakat Sumut yang akrab dipanggil Romo ini mengatakan, “Menjadi saran bahwa ada kunjungan kerja ke daerah pedalaman dalam agenda Komisi VIII DPR pada masa sidang III tahun 2014/2015 mendatang”. (mp, ss), foto : andri/parle/hr.

Akuntansi Akrual Jadi Basis Laporan Keuangan Pemda

Penerapan sistem akuntansi akrual kini jadi basis penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda). Dan opini BPK atas laporan keuangan daerah juga disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Demikian mengemuka dalam acara diskusi bertema “Analisis Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah” di DPR, Kamis (12/3). Akuntansi akrual sendiri adalah metode pencatatan pengeluaran dan penerimaan secara langsung ketika transaksi terjadi. Bukan dicatat saat transaksi itu diterima atau dibayarkan.

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini Ira Hayatunnisma (Kemendagri), Iwan Novarian (BPK RI), dan Erwin Antoni (BPK RI). Ira menjelaskan, penerapan akuntansi akrual ini didasari oleh Permendagri No.64/2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemda. Sistem laporan keuangan berbasis akrual sudah menjadi kebutuhan dalam menata keuangan daerah sekaligus pemberian opini oleh BPK.

Kemendagri pun kini sedang giat



Suasana Diskusi “Analisis Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

memberi bimbingan teknis (bimtek) ke setiap SKPD di daerah soal penerapan SAP berbasis akrual ini untuk meningkatkan pelayanan publik. Hanya saja, kendala SDM di daerah diakui sangat minim yang menguasai teknik SAP akrual. Apalagi, ungkap Ira, banyak pegawai daerah yang sudah mendapat bimtek seputar SAP akrual ini, malah dimutasi ke posisi yang tidak

lagi mengurus keuangan daerah.

Manfaat akuntansi akrual, sambung Ira, secara umum untuk memberi gambaran utuh atas posisi keuangan pemerintah. Selain itu, dimanfaatkan juga untuk mengetahui beban keuangan, memprediksi pendapatan, dan mengevaluasi kinerja pemerintah di bidang sumber daya ekonomi. (mh) foto: andri/parle/hr

Sosialisasi SPIP, Pegawai Setjen DPR Diharap Lebih Giat dan Hati-hati

Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengharapkan setelah diadakan sosialisasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), para

pegawai Setjen DPR bisa bekerja lebih efektif, tekun, fokus, lebih hati-hati dan lebih giat untuk mencapai tujuan. Sekarang ini semua pegawai dituntut

kinerja, sebab remunerasi mengikuti kinerjanya, jangan sampai menjadi turun, justru bisa menambah motivasi.

Hal itu dikatakan Sekjen DPR usai



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti membuka Sosialisasi SPIP

membuka acara Sosialisasi tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Ruang Pansus B, Gedung DPR, Senayan, Kamis (12/3). Hadir pula pada acara yang diikuti para pejabat Eselon II dan Eselon III ini Wakil Sekjen Achmad Djuned, Deputy Perundang-undangan Johnson Rajagukguk, Deputy Persidangan dan KSAP Tatang Sutharsa, sementara nara sumber yang hadir Hary Setiadi-Inspektur dari BPKP dan Ahmad Hasbi dari Kementerian PAN-RB.

Menurut Win-panggilan akrab Sekjen DPR, acara ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus pemahaman bahwa kita bekerja tidak asal bekerja, tapi berdasarkan target dan rambu-rambu. Dengan sosialisasi ini, diharapkan para pegawai bisa bekerja dengan baik dan target tercapai, tetapi tetap mengikuti aturan serta tidak harus menghabiskan ang-

garan yang ada. Intinya bisa efisien dan efektif.

Selama ini, lanjut Win, pemahaman kita semua adalah pengendalian intern itu adalah urusan unit pengawasan. Padahal itu semua melekat di semua pimpinan pejabat dan seluruh pegawai. Karena masing-masing pegawai itu sudah memiliki sasaran kinerja dan sudah mengisi sasaran kinerja pegawai (SKP) tiap hari.

“Masing-masing seharusnya berkomitmen bahwa bekerja di lingkungan Setjen DPR ini adalah untuk mencapai target-target setjen yang sudah ditetapkan bersama. Selain itu menjaga berbagai aturan untuk ditaati dan bekerja secara efisien dan efektif, tetapi cepat, tepat sebab kita mensupport Dewan,” tambah Win.

Itu harus dipahami, karena menurut Win, semua capaian Dewan itu mempengaruhi secara langsung maupun

tidak langsung proses pembangunan bangsa dan negara. Sementara posisi Setjen harus disadari bahwa sangat mempengaruhi kerja Dewan. Karena itu diingatkan, kalau seluruh pegawai dapat mencapai target-target kinerjanya yang terkait Renstra kesekjenan yang mengacu pada renstra dewan, sehingga target kerja Dewan juga akan tercapai.

Hadirnya pembicara dari BPKP, karena lembaga ini menjadi unsur pemeriksa intern pemerintah, memberikan perhatian bagaimana seluruh aparat pemerintah itu melaksanakan kegiatannya dengan baik dan benar. Sementara Kementerian PAN-RB adalah unsur penilai kinerja seluruh aparat sipil negara dan laporan keuangan dan ketertibannya oleh Kementerian Keuangan. “Jadi memang harus ada kegiatan yang sinergi dengan semua aturan dan pedomannya kita pahami,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Damayanti mengatakan, SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisien pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Setjen DPR. Seperti keandalan laporan, pengamalan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dia berharap dengan sosialisasi ini dapat menambah dan meningkatkan kesadaran para pegawai Setjen DPR untuk bekerja lebih akuntabel demi meningkatkan kinerja ke depan. (mp)

foto: naefuodji/parle/hr

DPR Soroti Pasal Pencalonan Gubernur DIY

Tim Pemantau Undang-Undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diminta lebih komprehensif dalam mengkaji berbagai persoalan terkait Keistimewaan DIY.

“Tim harus memandang Keistimewaan DIY dengan terlebih dahulu mencoba memahami UU Keistimewaan DIY, Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) dan kepentingan masyarakat secara lebih luas, berkaitan dengan keinginan UU Keistimewaan dibuat adalah yang salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Esti Wijayati anggota DPR asal DIY baru-baru ini.

UU Keistimewaan DIY, lanjutnya, dibentuk berlandaskan pada asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhinneka tunggalikaan, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan

lokal.

Dia menjelaskan, maksud keistimewaan DIY sebagaimana tertuang dalam UU ini diterjemahkan dalam 5 hal yakni tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

“Ada beberapa hal prinsip yang harus diperhatikan, pertama berkaitan dengan turunan dari UU Keistimewaan, yang mensyaratkan kepada DPRD atau Pemerintah Provinsi untuk menyusun Perda Istimewa. Artinya, Perda Keistimewaan bukan mengatur Kraton, tetapi berkaitan dengan Pemerintahan yang bersifat Istimewa,” jelasnya.

Menurutnya, terdapat beberapa hal krusial yang mengemuka terkait Perda Istimewa, yang perlu diperhatikan. “Terdapat perbedaan pendapatan di kalangan DPRD DIY sendiri



Anggota Komisi II DPR Esti Wijayati

maupun beberapa masyarakat Jogja, yaitu mengenai Calon Gubernur mendatang,” jelasnya.

Terkait pencalonan Gubernur DIY yang harus menyertakan Daftar Riwayat Hidup Istri, dia menjelaskan hal itu memang tertuang didalam Undang-Undang DIY. Hal tersebut tidak perlu diperdebatkan dan diserahkan sepenuhnya kepada Keraton. “Memang semestinya tidak boleh ada diskriminasi politik dalam hal ini Laki-laki dan perempuan,” terangnya.

Dia menambahkan, pihaknya telah mendengarkan masukan dari Gubernur DIY, Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana X Bendara Raden Mas Herjuno Darpito atau Ngarso Dalem sendiri, yang mengharapkan digantinya klausul itu dengan Daftar Riwayat Hidup Suami/Istri.

“Itulah yang terbaik untuk daerah Istimewa Yogyakarta. Persoalan apakah nanti yang menjadi calon gubernur berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, itu sudah ada mekanisme di keraton (Paugeran). Dan kita (DPR RI/DPRD DIY/ siapapun) tidak boleh mengintervensi yang sudah menjadi paugeran di kasultanan. “Itu adalah hak yang ada di ranah Paugeran,” tegasnya. (as), foto : agung sulistiono/parle/hr.

Pengembangan Desain Produk UKM Perlu Didukung

Daya saing produk UKM di pasar ekspor masih rendah. Untuk itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan merilis pengembangan inovasi desain produk UKM dari seluruh Indonesia agar bisa bersaing di pasar ekspor.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan (dapil Jabar IV) mendukung langkah tersebut. Menurut Heri, selain memperbaiki kemasan, pengembangan desain produk itu juga mengefisienkan biaya produksi. “Langkah Kemendag merintis pusat desain produk UKM adalah langkah strategis yang perlu didukung. Desain produk yang benar akan berpengaruh pada proses produksi yang efisien. Pada akhirnya, harga jual akan lebih bersaing,” katanya, saat dihubungi Jumat (13/3).

Kemendag sendiri lewat Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional segera merintis pusat pengembangan desain regional pada akhir tahun ini. Kelak di setiap daerah ada pusat desain produk yang membimbing para pelaku UKM mendesain dan mengefisienkan hasil-hasil produksinya.

Ditambahkan Heri, langkah perbaikan produk UKM tersebut sangat strategis untuk menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015 ini. Di era MEA, tuntu-



Suasana Rapat Komisi VI DPR RI

tan daya saing sangat tinggi. “Di pasar regional dan internasional, menurut saya, Indonesia masih sebagai *price taker* bukan penentu harga. Dengan adanya pusat pengembangan desain produk, saya harap harga-harga produk yang dihasilkan bisa lebih kompetitif,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Masalah desain produk, diakui Heri, masih jadi masalah para pelaku UKM. Heri mencontohkan, di Sukabumi banyak produk UKM terutama makanan dan minuman yang tidak bisa menem-

bus pasar ASEAN (Malaysia dan Singapura), karena terkendala masalah desain kemasan. Hampir semua pelaku UKM di Indonesia juga mengalami hal serupa.

“Saya berharap, ke depan pusat pengembangan desain produk bisa menjadi solusi untuk menghadirkan produk dengan harga kompetitif, mengefisienkan proses produksi, dan menambah daya tarik pasar terhadap produk-produk Indonesia,” ujar Heri. (mh) foto: iwan armanias/parle/hr

BPJS Ketenagakerjaan Upayakan Jamin Para Pekerja



Diskusi “Analisis atas Pengalihan PT.Askes Menjadi BPJS Kesehatan dan PT.Jamsostek Menjadi BPJS Ketenagakerjaan

Para pekerja formal dan non formal di seluruh Indonesia segera dijamin hak-haknya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kini, BPJS Ketenagakerjaan tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU No.24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Demikian disampaikan Paryudhianto dari BPJS Ketenagakerjaan saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Analisis atas Pengalihan PT. Askes Menjadi BPJS Kesehatan dan PT.Jamsostek Menjadi BPJS Ketenagakerjaan” di DPR, Selasa (10/3). Para PNS, pekerja kontrak, *outsourcing*, hingga yang non formal seperti sopir, pekerja perkebunan, dan lain-lain diupayakan mendapat perlindungan berupa jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Tentu butuh pengaturan teknis yang melingkupi semua jenis pekerjaan tersebut. BPJS ketenagakerjaan, kata Paryudhianto, berkomitmen memberi perlindungan bagi para pekerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi. “Penyelenggaraannya menggunakan

mekanisme asuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan juga melingkupi jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan ketenagakerjaan.”

Para pekerja *outsourcing* dan pekerja non formal lainnya, lanjut Paryudhianto, akan diberi hak yang sama dengan para pekerja tetap di sektor formal. Semuanya secara teknis akan diatur dalam rancangan Peraturan Pemerintah yang segera diterbitkan. Dalam rancangan tersebut memuat berbagai standar klaim jaminan bagi pekerja. Kecelakaan kerja hingga terjadinya kecacatan akan diatur pula dalam PP yang sedang digodok pemerintah tersebut.

Dalam PP tersebut juga kelak ada rumus perhitungan klaim jaminan kecelakaan kerja. Bahkan bila terjadi kematian, pekerja yang bersangkutan akan menerima dana pemakaman dari instansi tempatnya bekerja. “Agar masyarakat dapat memahami dan mengerti tentang sistem BPJS Ketenagakerjaan ini, nanti tim BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan koordinasi dengan setiap instansi. Di setiap cabang akan ada petugas khusus yang akan bertanggung jawab,” jelas Paryudhianto. (mh, gt) foto: andri/parle/hr

Perlu Dibentuk Bank Usaha Milik Nelayan

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan dirinya setuju dibentuk Badan Usaha Milik Nelayan (BUMN) sebagai pilihan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, selain pendirian Badan Urusan Logistik (Bulog) Nelayan guna mengatur tata perdagangan hasil tangkapan ikan.

Hal tersebut terungkap saat diskusi Forum Legislasi bertemakan “RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan” di ruang pressroom DPR, Jakarta, (10/3) hadir pula sebagai pembicara lainnya Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yusuf Solichien serta pengamat pertanian dan perikanan dari IPB Arif Satria.

“Alternatif pemberdayaan nelayan itu bisa menjadi pilihan akibat masih sulitnya nelayan untuk mendapatkan kepercayaan perbankan dalam hal pengucuran kredit permodalan,” tegas Herman.

Ia menambahkan, dengan mendirikan Badan Usaha Milik

Nelayan, badan usaha itu bisa digunakan untuk menampung kapal-kapal asing yang ditangkap di laut akibat melanggar wilayah perairan Indonesia. Selain itu, BUMN tersebut akan sangat bermanfaat dalam menyangga perekonomian nelayan.

“Memang diketahui, sampai saat ini, perbankan nasional termasuk bank BUMN masih enggan memberikan kredit permodalan kepada para nelayan karena aset mereka dinilai tidak layak untuk dijadikan jaminan dan dianggap berisiko. Akibatnya, nelayan kesulitan modal untuk membiayai operasi mereka sehingga berdampak pada penghasilan dan tingkat kesejahteraan,” jelasnya.

Sedangkan pada sisi lain, meski memiliki kemampuan, pemerintah tidak menunjukkan keinginan untuk mendirikan Bank Nelayan yang secara khusus melayani permodalan dan perkreditan untuk nelayan.



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron

“Padahal, semasa kampanye pilpres Presiden Jokowi pernah mewacanakan *spin-off* Bank BRI untuk dijadikan Bank Nelayan guna menggerakkan perekonomian dari sektor agromaritim,” ujar Herman politisi dari Partai Demokrat ini.

Selanjutnya, jelas Herman, kalau Bank Nelayan sulit untuk direalisasikan, ia menyarankan pemerintah menugaskan Bank BUMN/BUMD membuat unit khusus untuk membiayai sektor perikanan yang terintegrasi dengan sektor pertanian.

“Ini bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan. Kemampuan pemerintah ada tapi kemauannya yang tidak ada,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua umum HNSI Yusuf Solichien mengatakan untuk menata pemasaran hasil tangkapan nelayan diperlukan mekanisme pengaturan harga. “Mekanisme itu, diperlukan untuk melindungi hasil tangkapan nelayan dengan membentuk sebuah badan,” terangnya.

Menurut dia, badan tersebut bisa berupa Badan Usaha Logistik (Bulog) Perikanan. Dengan demikian para nelayan mendapatkan harga ikan terbaik ketika musim panen dan musim paceklik. “Dengan adanya Bulog tersebut mereka juga akan terhindar dari praktik tengkulak yang sering merugikan para nelayan,” harapnya. (nt/sc) foto: andri/parle/hr

Peserta Askes Otomatis Terdaftar Sebagai Peserta JKN



PNS Setjen DPR RI serius mengikuti Diskusi Pengalihan Askes ke BPJS Kesehatan

Para PNS yang dahulu pernah menjadi peserta Asuransi Kesehatan (Askes) dari Pemerintah sudah otomatis terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Instansi tempat para PNS bekerja mesti memberi fasilitas penggantian kepesertaan dari Askes ke JKN.

Demikian terungkap dalam diskusi bertajuk “Analisis atas Pengalihan PT.Askes Menjadi BPJS Kesehatan dan PT.Jamsostek Menjadi BPJS Ketenagakerjaan” di DPR, Selasa (10/3). Diskusi ini hasil kerja sama Bagian Analisa Pemeriksaan BPK dan Pengawasan DPD. Hadir sebagai pembicara

Purnawarman Basundono (BPJS Kesehatan), Paryudhianto (BPJS Ketenagakerjaan), dan Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch).

Purnawarman menjelaskan, para PNS itu tak perlu mendaftar lagi untuk kepesertaan BPJS Kesehatan, kecuali bagi yang belum memiliki kartu Askes. Instansi tempat PNS bekerja mesti proaktif mendata ulang kepesertaan Askes untuk kemudian dialihkan ke BPJS Kesehatan. Sementara data peserta PNS yang masuk ke BPJS Kesehatan menjadi otoritas BPJS untuk mengaudit dan memperbarui data.

Pada bagian lain Purnawarman, mengungkapkan, ketika PT.Askes dinyatakan bubar tanpa likuidasi, semua aset, liabilitas, dan hak hukum beralih ke BPJS Kesehatan. PT.Askes pun sudah diaudit oleh akuntan publik untuk mengetahui posisi terakhir neraca keuangannya. Ada sedikit masalah pengalihan terutama menyangkut tunggakan PT.Askes senilai lebih dari Rp943 miliar oleh pemerintah daerah. Tunggakan itu terus ditagih.

Sementara Paryudhianto memaparkan, jaminan kesejahteraan bagi para pegawai tidak tetap (PTT) di semua

instansi pemerintah masih menyisakan banyak masalah. Program BPJS Ketenagakerjaan bagi para PTT yang meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) mestinya sudah di-cover instansi tempatnya bekerja.

Hanya saja karena program ini baru dirilis per 1 Januari 2015 jadi tentu

belum semua masalah terselesaikan. Rancangan Peraturan Pemerintah menyangkut perlindungan para pekerja untuk BPJS Ketenagakerjaan belum turun. Jadi, masih menunggu seperti apa pengaturannya kelak.

JKK dan JKM ditanggung oleh instansi tempat PTT bekerja. Sementara JHT ditanggung instansi sebesar 3,7%

dan peserta dalam hal ini PTT 2%. “Yang jelas kami nanti akan melakukan koordinasi dengan setiap instansi. Jadi, kami mempunyai cabang-cabang. Cabang-cabang terdekat itulah yang nanti akan meng-cover instansi berada. Ada petugas khusus yang nanti akan bertanggung jawab,” papar Parudhianto. (mh,gt), foto : andri/parle/hr.

Rekrutmen Parpol Berkualitas Untungkan Rakyat



Anggota Komisi II DPR Arwani Tomafi

Wacana Mendagri yang akan mengucurkan dana 1 triliun kepada parpol dimaksudkan untuk menata agar partai politik bisa menjadi organisasi yang modern dan efektif dalam melakukan tugas-tugas pendidikan politik dan kaderisasi. Yang lebih penting adalah terjalannya hubungan dalam kepemimpinan baik di pusat maupun daerah, juga di tingkat eksekutif maupun legislatif.

“Kalau rekrutmen pemimpin partai politik itu baik dan berkualitas yang beruntung adalah rakyat karena dipimpin oleh tokoh yang kredibel. Selain itu, negara tidak sisa-sisa mengeluarkan biaya sebanyak itu untuk partai politik,” tandas anggota Komisi II DPR Arwani Tomafi saat dihubungi Parlemen, Selasa (10/3).

Menurut politisi PPP ini, di satu sisi kita memang membuka kebebasan untuk warga negara untuk berdemokrasi sesuai dengan konstitusi tetapi harus ada syarat-syarat dan aturan yang memberikan jaminan bahwa orang itu tidak

main-main dalam membentuk partai politik. Tidak semua partai politik itu berhak mendapat dukungan anggaran dari negara, harus parpol yang eksis baik di daerah maupun di pusat.

Parpol tersebut diakui dan mempunyai aturan dan batas-batas tertentu untuk menunjukkan bahwa memang dipilih oleh rakyat sesuai syarat ketentuan membuat partai politik serta memenuhi syarat kepesertaan dalam pemilu. Tak kalah penting syarat dalam melakukan konsolidasi di seluruh wilayah nusantara, artinya mempunyai sekretariat dan kepengurusan yang efektif, betul-betul bisa bekerja untuk menjalankan fungsi-fungsi dan tugas parpol serta pendidikan politik di seluruh Indonesia.

Selama ini kata Arwani, pemberian bantuan dana ditentukan per suara per tahun, namun dukungan anggaran ini jauh dari kebutuhan riil partai politik. Bahkan ada yang menyebutkan bantuan dana dari APBN hanya bisa mengcover kurang dari 2 persen kegiatan partai politik. “Dilihat dari geografis Indonesia yang begitu luas dengan 77 tabel tentu pekerjaan partai politik bisa dikualifikasi, bantuan selama ini tidak memadai,” ujarnya.

Untuk kepentingan transparansi pengelolaan keuangannya, Ketua DPP PPP ini mengusulkan pemerintah menempatkan satuan kerja (kuasa pengguna anggaran) di setiap parpol. “Jadi ada jasa pengguna anggaran khusus yang ditempatkan di setiap parpol dengan pengawasan yang ketat,” sebut Arwani.

Pengawas keuangan dari pemerintah dengan menempatkan kuasa pengguna anggaran, kata dia, bertugas mengawasi perencanaan program yang mengetahui standar biaya untuk pendidikan politik di seluruh daerah pemilihan. Disamping itu harus jelas standar biaya rekrutmen di tingkat nasional dan daerah serta biaya pengelolaan kantor partai. (mp,ss), foto : naefurodjiparle/hr.

Okky: Setuju Iuran PBI Ditinjau Kembali

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati (Dapil Jakarta II) setuju besaran penerima bantuan iuran (PBI) ditinjau kembali untuk dinaikkan pada tahun 2016. Kenaikan PBI dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan rencananya

dinaikkan dari Rp19.225 menjadi Rp27.500.

“Iuran PBI yang dievaluasi setiap dua tahun, saya sepakat sekali, karena berbicara mengenai pelayanan kesehatan harus melihat pula aspek lain seperti dollar naik dan alat-alat kesehatan

naik. Belum lagi kebutuhan hidup para dokter, para tenaga kesehatan, dan juga tarif listrik naik. Apalagi sekarang jarak antara iuran PBI dan mandiri cukup jauh. Jadi, menurut saya kalau itu perlu ditinjau, ya bagus setiap dua tahun sekali,” kata Okky saat dihubungi

Senin (9/3).

Namun, saat yang sama politisi PPP ini juga mengeritisi bila ada rencana kenaikan iuran mandiri peserta JKN. Kebutuhan harian masyarakat sedang naik tajam saat ini. Bila iuran mandiri juga dinaikkan itu sangat membebani masyarakat peserta JKN dari BPJS Kesehatan.

“Mendingan membereskan dulu pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasakan manfaatnya. Jangan seperti sekarang manfaatnya belum sempurna, tetapi sudah ada wacana menaikkan iuran. Itu sebetulnya sudah membuat keresahan sendiri.” Okky mencontohkan keluhan masyarakat di dapilnya yang tak ingin iuran peserta mandiri dinaikkan, karena harga BBM dan tarif tol sudah naik. Padahal, BPJS Kesehatan sudah

mendapat suntikan dana lagi dalam APBN-P 2015.

Masyarakat, dihimbau Okky, untuk segera mendaftar menjadi peserta mandiri saat sehat. Ketika mendaftar dalam kondisi sehat berarti yang sehat membantu yang sakit dengan iuran mandiri tersebut. Masyarakat, memang, perlu terus diberi edukasi soal ini agar betul-betul memahami manfaat keberadaan BPJS Kesehatan.

“Bergabung menjadi peserta BPJS itu jangan di kala sakit. Dengan kita mengiur ketika sehat, itu sebetulnya kita sudah membantu orang lain. Pada saat kita mengiur tapi kita sedang sehat, itu sebetulnya kita ikut membantu tetangga kita yang mungkin sakit kanker yang perlu dikemoterapi setiap bulannya. Hal-hal seperti inilah yang selalu saya sosialisasikan kepada masyarakat,”



Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati

jasasnya mengakhiri wawancara. (mh),
foto : naefurodji/parle/hr.

Sebaiknya Benahi Pelayanan Sebelum Naikkan Iuran BPJS

Menyusul rencana BPJS Kesehatan yang akan menaikkan iuran program JKN bagi rakyat miskin lewat fasilitas penerima bantuan iuran (PBI), banyak pro kontra yang disampaikan publik. Namun, BPJS didesak untuk memperbaiki layanan kesehatan bagi rakyat miskin sebelum menaikkan iuran PBI tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani (dapil Sumsel II) menegaskan, layanan dan sarana kesehatan harus lebih dulu diperbaiki daripada mendahulukan usulan kenaikan iuran. “Seharusnya BPJS Kesehatan jangan bicara soal kenaikan iuran dulu. Benahi distribusi kartu, update data, dan pelayanan kepada masyarakat yang masih amburadul.”

Melihat pengalaman masyarakat



Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani

di dapilnya, Irma mengungkapkan, ternyata masyarakat satu desa di Desa

Kuripan, Muara Enim sama sekali belum menerima PBI dari BPJS Kesehatan. Ini menjadi temuan penting bagi BPJS Kesehatan di Sumatera Selatan. “Saya tidak setuju ada kenaikan jika kinerja BPJS tidak jelas dan tidak berprestasi,” kata politisi Partai Nasdem tersebut.

Seperti diketahui, BPJS Kesehatan akan menaikkan iuran bagi warga miskin penerima fasilitas PBI dari Rp19.225 menjadi Rp27.500 pada tahun 2016. Selama program JKN berjalan satu tahun, BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran sehingga harus menggunakan dana cadangan yang ada. Selama 2014 iuran yang terkumpul sebesar Rp41,06 triliun, sedangkan pengeluarannya sebesar Rp42,6 triliun. (mh), foto : naefurodji/parle/hr.

Anggaran BPJS Kesehatan Perlu Diaudit

Anggaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan perlu diaudit kembali untuk transparansi anggaran. Defisit anggaran yang diklaim BPJS Kesehatan selama setahun ini harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Anggota Komisi IX DPR RI Hamid Noor Yasin (dapil Jateng IV) mengemukakan hal tersebut kepada Parlemen, Jumat (6/2). Apalagi, saat ini BPJS Kesehatan berencana akan menaikkan iuran PBI (penerima bantuan iuran) pada 2016. Audit menjadi keniscayaan di tengah rencana kenaikan iuran

PBI bagi warga miskin tersebut.

“Terhadap pelaksanaan JKN oleh BPJS yang katanya mengalami defisit, perlu dilakukan audit untuk mengetahui duduk persoalan agar lebih transparan dan *accountable*,” komentar Anggota F-PKS itu. Hamid menyatakan setuju atas rencana kenaikan iuran PBI dari yang semula Rp19.225 menjadi Rp27.500. BPJS mengklaim, selama 2014 iuran yang terkumpul sebanyak Rp41,06 triliun. Sedangkan pengeluaran sebesar Rp42,6 triliun.

Defisit anggaran tersebut ditutupi oleh dana cadangan teknis yang tersimpan sebesar Rp6 triliun. Kini, sisa dana cadangan BPJS tinggal Rp2,2 triliun. “Saya setuju atas rencana kenaikan iuran bagi masyarakat miskin lewat PBI tersebut. Ini agar masyarakat miskin peserta PBI JKN lebih ter-cover biayanya. Berapapun anggarannya asal diperuntukkan untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat miskin akan kita dukung maksimal di DPR,” ujar mantan Anggota DPRD Wonogiri ini.

Hamid menambahkan, Kemenkes dan BPJS Kesehatan perlu menjelaskan ke publik dasar kenaikan tersebut di luar masalah defisit anggaran. Soalnya, lanjut Hamid, layanan kesehatan bagi pasien miskin masih jauh dari memuaskan.



Anggota Komisi IX DPR Hamid Noor Yasin

“Apakah pemerintah berani menjamin kenaikan iuran sebesar Rp8.275 akan meningkatkan kualitas pelayanan. Sementara perbaikan operasional masih belum memuaskan.” (mh), foto : andri/parle/hr.

Pemberian Dana 1 T Parpol Harus Pertimbangkan Keuangan Negara



Anggota Komisi II DPR Arwani Tomafi

Anggota Komisi II DPR Arwani Tomafi mengatakan, wacana pemberian bantuan dana untuk partai politik sebesar Rp 1 triliun, harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Pengelolaan dana tersebut juga harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga parpol terhindar dari *mismanagement* dalam pengelolaan keuangan.

“Kalau sekarang ini kurang dari 2 persen dan bisa ditingkatkan ke 3 persen dulu, dan lima tahun ke depan ditingkatkan sampai 60 persen dan 10 sampai 20 tahun ke depan

partai politik bisa penuh dibiayai oleh negara,” kata Arwani saat dihubungi Selasa (10/3).

Hal itu dikemukakan menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, soal perlunya, dalam jangka panjang, menggulirkan wacana pembiayaan partai politik sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurut dia, wacana ini perlu dukungan dan dipikirkan oleh DPR serta elemen masyarakat pro-demokrasi. Tujuannya, kata Tjahjo, untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi.

Saat ditanyakan, apakah pemberian dana itu bisa mencegah BUMN yang selama ini menjadi sapi perah parpol, Arwani Tomafi mengatakan, arahnya juga harus kesana. Praktek-praktek yang selama ini dianggap kurang mendukung mewujudkan negara yang bersih serta kehidupan bernegara yang baik harus dihentikan.

Meski demikian, Ketua DPP PPP ini mengingatkan, pemberian dana itu harus barengi dengan pemberian sanksi pidana yang lebih berat. Penggunaan anggaran yang besar ini dengan tujuan yang mulia, yakni mewujudkan partai politik yang modern dan transparan. Dengan dukungan dan itu maka parpol tidak perlu mencari dana kesana kemari, akan focus pada tugas-tugas yang sangat penting dari sebuah partai politik.

“Dalam hal sanksi pidana akan diberlakukan pada kedua pihak, bisa pengurusnya, bisa ke badan hukum, bisa ke personalnya. Bisa ke partai politiknya, serta bisa jadi mengarah ke pembubaran partai jika terjadi indikasi korupsi secara sistematis,” kata Arwani menambahkan. (mp,ds), foto : rizka/parle/hr.



Pemerintah Tegas, Bandar Narkoba Jera



Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsy

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsy mengingatkan pemerintah terutama Kejaksaan Agung untuk tetap melaksanakan rencana eksekusi mati bagi terpidana narkoba sesuai jadwal. Baginya ketegasan pemerintah dalam melaksanakan penegakan hu-

kum akan memberikan efek jera yang efektif bagi bandar narkoba.

“Jika pemerintah terlihat lembek dalam menyikapi berbagai intervensi dari luar negeri, maka hal itu akan menjadi angin segar untuk para bandar narkoba. Akibatnya efek jera dari

hukuman mati akan berasa hambar, tak lagi menakutkan dan tak membawa efek jera lagi,” katanya dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/3/15).

Terkait usulan tukar menukar tahanan yang disampaikan pemerintah Australia menurutnya hal tersebut tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Politisi Fraksi PKS ini menekankan negara lain sudah sepatutnya menghormati kedaulatan hukum yang berlaku di Indonesia. “Jadi jangan ada penundaan, apalagi tukar menukar tahanan,” tandasnya.

Sementara itu dalam kesempatan berbeda Jaksa Agung HM. Prasetyo sudah menyatakan menolak tawaran yang diajukan pemerintah Australia. Ia meyakini penolakan itu tidak akan mengganggu hubungan bilateral dua negara karena sudah ada kesepakatan untuk menghargai kedaulatan hukum masing-masing negara.

“Komitmen itu harus dihargai. Lagi pula, kejahatan narkotik itu *most serious crime* yang harus ditangani,” ujar dia. Perkembangan terakhir dua napi narkoba asal Australia sudah berada di LP Nusakambangan, Cilacap, Jateng. Mereka menunggu eksekusi bersama delapan terpidana narkoba lainnya.

(iky), foto : andri/parole/hr.

Yankes DPR Sosialisasikan Menu Seimbang

Unit Pelayanan kesehatan (Yankes) DPR-RI mengadakan sosialisasi dengan tema Pengaturan Gizi Seimbang pada Jumat (6/3) di Ruang Pansus B Gedung Nusantara III. Kegiatan ini merupakan inisiatif dari Yankes yang merupakan pusat kesehatan di DPR dan sudah dilakukan sebanyak dua kali. Acara tersebut dihadiri oleh para pengusaha makanan baik kantin maupun café di lingkungan DPR dan perwakilan Koperasi DPR RI.

Tampil dalam acara ini dua ahli gizi DPR Ani Prasetyaningsih dan Rianti Sriwidayati. Menurut keduanya, tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah ingin memberikan tambahan pengetahuan bagi para penyedia makanan yang ada di sekitar Gedung DPR. “Kami sebagai pengawas pengendali kesehatan di se-



Yankes DPR RI mengadakan sosialisasi bertema Pengaturan Gizi Seimbang

luruh lingkungan DPR harus juga bisa memberikan masukan kepada para penyedia makanan,” ungkap Ani.

Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan berbagai kriteria menu makanan yang seimbang serta lengkap dengan cara penyajian makanan yang baik. “Pada saat penyajian makanan, seorang penyaji harus menggunakan peralatan seperti sarung tangan, topi, dan celemek masak supaya hal-hal penyebab pencemaran makanan dapat dihindari. Hal yang paling penting juga adalah jangan membiarkan sampah berceceran dekat dengan bahan makanan. Itu merupakan penyebab paling beresiko makanan tercemar bakteri,” jelas Ani.

Ditambahkan, pencegahan pencemaran makanan dapat dilakukan melalui sanitasi yaitu melakukan pembersihan lingkungan (area kerja)

setiap hari, mulai dari membuang sampah, melakukan penyemprotan serangga dan menjaga saluran air berjalan lancar. “Bila perlu ibu-ibu dan bapak-bapak dapat langsung melakukan komunikasi kepada pihak Koperasi DPR RI untuk melengkapi peralatan yang masih kurang supaya menunjang terciptanya kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Soal kriteria, menurut Ani, para penyedia makanan di lingkungan DPR sudah memenuhi kriteria hanya saja pemeliharannya yang masih kurang. “Sebenarnya fasilitas juga sudah terpenuhi, cuma cara pemeliharannya atau *maintenance*-nya yang kurang sehingga resiko untuk pencemaran itu masih bisa terjadi,” jelasnya.

Bambang Soleh Zulfikar, Kepala Sub Medis Yankes DPR menjelaskan,

pihaknya memiliki empat fungsi dalam pelayanannya, antara lain, fungsi preventif, promotif, akuratif, dan rehabilitatif. “Kita melakukan fungsi preventif yaitu pencegahan, fungsi promotif yaitu mempromosikan hal-hal yang baik, kemudian ada akuratif yaitu pengobatan kepada orang yang sakit untuk dipulihkan atau disembuhkan, di Yankes kita mempunyai dokter umum, dokter gigi, dan sekarang sudah ada 11 dokter spesialis,” tuturnya.

Yang terakhir, lanjut Bambang, fungsi rehabilitatif yaitu orang yang sakit dipulihkan menjadi sehat. Keempat fungsi tersebut merupakan pelayanan kepada seluruh anggota dewan dan termasuk karyawan yang ada di lingkungan DPR. (mp, ss,ds), foto : naefurodij/parle/hr.

Setjen DPR Gelar Workshop Penyusunan Arsitektur dan Informasi Kinerja

Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar pembekalan terkait penataan Arsitektur dan Indikator Kinerja DPR RI, dalam rangka meningkatkan pemahaman sumber daya manusia di bidang Arsitektur dan Informasi Kinerja.

“Kegiatan penataan arsitektur dan informasi kinerja harus dilakukan, untuk pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI Achmad Djuned, saat membuka Workshop bertajuk “Penyusunan Arsitektur dan Informasi Kinerja Bagi Pejabat dan Pegawai Setjen DPR RI, Jumát (6/3), di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Achmad Djuned mengatakan, penataan arsitektur dan informasi kinerja dalam rangka penguatan penganggaran berbasis kinerja, berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan No.136 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dilakukan penataan Arsitektur dan Informasi (ADIK) dalam RKA-K/L.

“Hal ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90



Wakil Sekjen DPR RI Achmad Djuned

Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,” paparnya.

Dengan melihat kerangka dasar (*Grand Design*) merupakan konsep dasar yang mendasari pengambilan kebijakan strategi dari penguatan penyusunan anggaran, maka yang akan dilakukan, menurut Achmad Djuned, adalah penataan arsitektur dan informasi kinerja RKA-K/L, penataan arsi-

tektur dan makro strategis, penguatan data, penguatan metode dan proses evaluasi, proses perencanaan, mengubah *mindset* (pola pikir yang mempengaruhi pola kerja), dan meningkatkan kompetensi.

“Dari 7 kegiatan yang ada dalam *grand design* strategi penguatan penyusunan anggaran, kita (Setjen) baru akan melakukan pada tahap pertama yaitu, penataan arsitektur informasi kinerja RKA-K/L, tahap selanjutnya masih banyak yang harus kita lakukan,” ujarnya.

Setjen DPR telah berusaha peringkat kinerja selalu meningkat. Oleh karena itu, seluruh Pegawai Setjen DPR harus serius melakukan peningkatan kualitas kerjanya. Achmad Djuned mengharapkan seluruh Pegawai Setjen DPR RI dapat melaksanakan penataan Arsitektur dan Indikator Kinerja.

“Kami semua bersepakat untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja dengan terukur dan berkala, ketika indikator kinerja lebih baik, nantinya akan membawa kebaikan bagi Sekretariat Jenderal DPR ke depan,” kata Achmad Djuned. (as), foto : andri/parle/hr.

BERITA FOTO

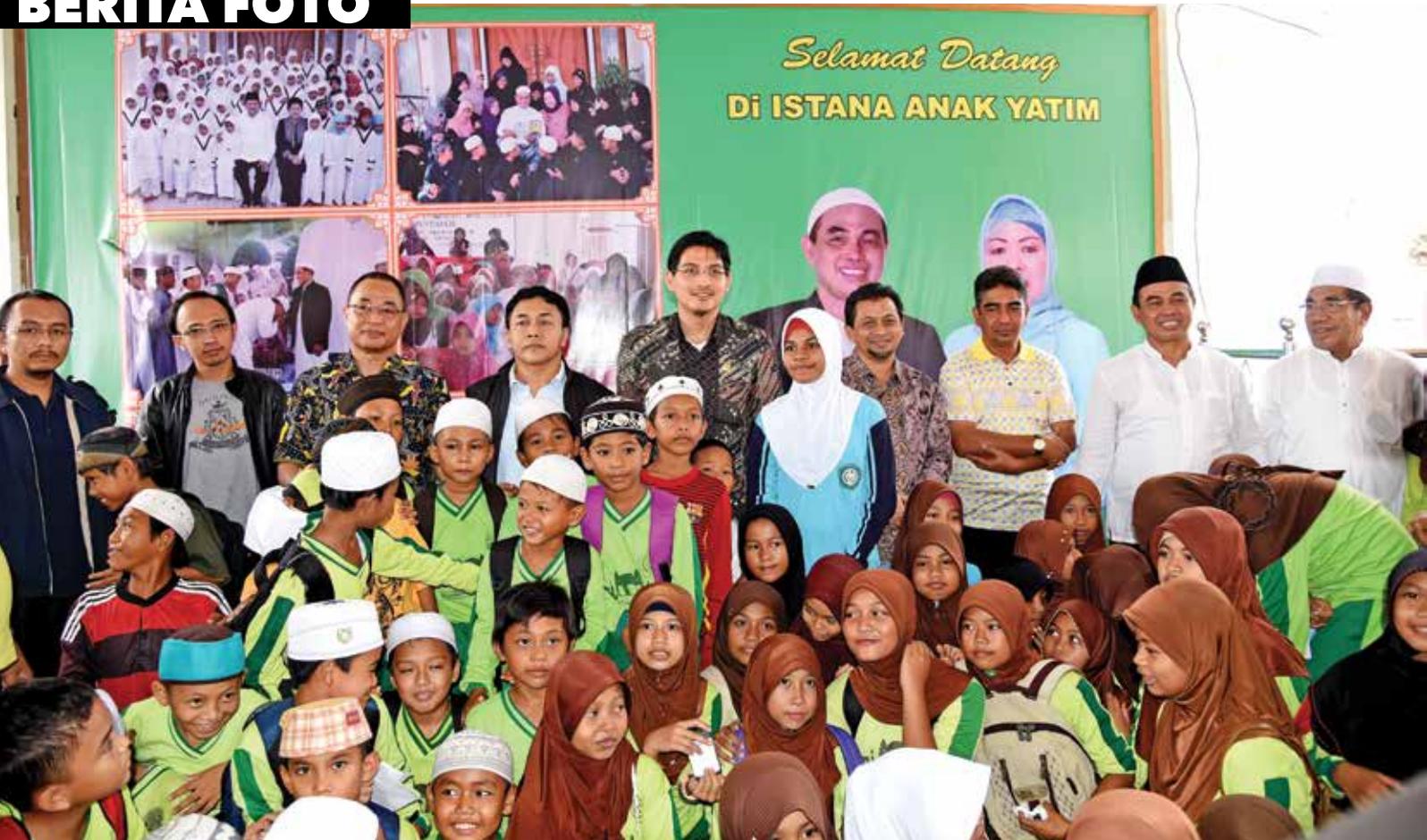


Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI meninjau Pertambangan Batubara Kalimantan Selatan dipimpin Wakil Ketua Komisi Zairullah Azhar. Foto: Eka Hindra/Parle/HR



Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI saat meninjau tempat sengketa hutan lindung di Mandailing Sumatera Utara. Foto: Rizka/Parle/HR.

BERITA FOTO



Selesai melakukan Kunjungan Kerja Komisi VII mengunjungi Rumah Istana Yatim Piatu di Batulicin Kalimantan Selatan. Foto: Eka Hindra/Parle/HR



Tim Kunker Komisi VI DPR RI berkunjung ke Balai Latihan Kerja Industri di Makassar, Sulsel. Foto: Husen/Parle/HR

Komisi VII DPR Desak PLN Tingkatkan Rasio Elektrifikasi NTB



Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika

Komisi VII DPR mendesak PT PLN NTB meningkatkan rasio elektrifikasi di NTB yang masih rendah dimana masih ada 36 persen rumah tangga yang belum menikmati listrik.

“Rasio elektrifikasi di NTB masih sangat rendah itu perlu ditingkatkan karena jika dilihat daerah tersebut masih pu-

nya potensi untuk berkembang,” ujar Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika kepada Parlemen.

Menurut Kardaya, elektrifikasi ini juga menyangkut prasarana listrik pedesaan yang harus ditingkatkan. “Mengetahui listrik diakui memang suplai dan *demand* di NTB cukup memperhatikan banyak terjadi pemadaman. Kami meminta pembangkit listrik yang terbengkelai ditingkatkan,” jelasnya.

Dia mengakui memang ada potensi yang cukup besar seperti Geothermal namun masih terkendala perijinan karena terletak di kawasan hutan lindung. “Memang ada potensi yang cukup bagus seperti *geothermal* cukup besar juga tidak dikembangkan, karena ada hal yang tersangkut kehutanan itu,” jelasnya.

Dia menambahkan, hal itu merupakan tugas Komisi VII DPR untuk mengkoordinasikan persoalan tersebut dengan Kementerian Kehutanan. “Ini juga dapat menjadi alasan sumber pembangkit listrik bisa saja memakai diesel tetapi impor BBM dapat meningkat,” katanya. (Si) foto: iwan armianas/parle/hr

Ekonomi Morat-marit Munculkan Keraguan Pada Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan mengatakan, morat-maritnya kinerja pemerintah di bidang ekonomi dengan naiknya BBM, rupiah yang anjlok, harga beras melambung hingga 30 persen, nampaknya mulai memunculkan keraguan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Dalam keterangan persnya Kamis (12/3), di Jakarta, politisi Partai Gerindra ini mengatakan, indikasi tersebut bisa dilihat dari beberapa hasil survei yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Jokowi-Kalla di bidang ekonomi, cenderung terus menurun. Khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran, stabilitas nilai rupiah, mengurangi jumlah orang miskin, stabilitas harga sembako yang dinilai angkanya kurang dari 50 persen.

Lebih jauh ia mengatakan, dengan kondisi ketatanegaraan dan perpolitikan yang seakan dipecah belah, masyarakat merasa bahwa seluruh kebijakan tersebut menimbulkan dampak terhadap perekonomian.

“Kini mayoritas masyarakat merasa was-was dan terus khawatir dengan kondisi ekonomi yang ada. Sementara investor disuruh tetap tenang kalau kondisinya *gonjang ganjing* dan tidak jelas. Yang jelas adalah masyarakat kecil menjerit,” ungkapnya.

Dari semua fakta itu, lanjut Heri, mulai muncul kesan bahwa pemerintahan ini tidak profesional. Sebaiknya Presiden harus segera merespon dengan melakukan evaluasi komprehensif atas kerja-kerja ekonomi, dan harus mengambil



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

langkah cepat dan tepat.

Kalau dibiarkan berlarut-larut, masyarakat akan terus menjerit. Terbukti dalam reses ini, dari jaringan aspirasi banyak keluhan yang muncul dari masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir ini, belum terlihat koneksitas dan konsistensi visi-misi ekonomi Jokowi-Kalla dengan pelaksanaannya di lapangan.

“Menurut hemat saya, pada akhirnya, seluruh kebijakan khususnya kebijakan ekonomi akan bergantung pada kuat-lemahnya kepemimpinan. Pemimpin kuat, maka kebijakan juga akan kuat. Sebaliknya pemimpin lemah, secara otoma-

tis kebijakan juga akan lemah, “ tegas Heri.

Koordinasinya kacau balau, karena tidak jelas komandonya kepemimpinan harus satu komando, satu suara, satu kerja. Jangan kerja... kerja... kerja... tapi tidak jelas apa yang mesti dikerjakan. Komandonya kacau, ujungnya koordinasi di lapangan kacau dan program kacau balau.

“Menteri-menteri bingung melapor pada siapa, ujungnya rakyat menjadi bingung. Negara ini seperti tidak mempunyai arah yang jelas, sementara rakyat semakin menjerit, semakin dirugikan,” pungkas Heri. *(spy,mp), foto : andri/parle/hr.*

Komisi VII DPR Desak PLN NTB Percepat Konversi Energi Konvensional

Komisi VII DPR Mendesak PLN NTB mempercepat proses konversi energi konvensional yang menggunakan diesel digantikan dengan batu bara. Pendapat itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha kepada Parlemen baru-baru ini.

“Komisi VII DPR sangat prihatin lambatnya konversi energi di PLN NTB terutama listrik. Peralnya, listrik disini masih banyak menggunakan listrik konvensional seperti diesel,” jelasnya.

Dia menegaskan, penggunaan diesel sangat menghamburkan keuangan negara karena itu harus segera diganti dengan energi lainnya seperti batubara, maupun panas bumi. “Itu menjadi sorotan kita, karena itu kita minta dalam waktu secepatnya memonitor betul *project* yang dijalankan termasuk PLTU Jeranjang yang menggunakan energi batubara. serta mencoba menggali energi lainnya seperti panas bumi karena ada Gunung Rinjani disana, serta tidak menutup kemungkinan Mikro Hidro atau air untuk daerah pelosok di NTB itu bertujuan mengurangi ketergantungan kita dengan diesel,” jelasnya.

Menurutnya, dengan cara itu kita dapat menurunkan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik dari 3400 Rupiah men-



PLTU Jeranjang, NTB

jadi 2000 Rupiah. “Kita harus mampu menekan dengan demikian subsidi listrik dapat berkurang drastis. Dengan merubah energi primer yang mahal menjadi energi yang relatif murah itu yang menjadi *stressing* kita untuk Provinsi NTB,” paparnya. *(Si) foto: ist/parle/hr*

Pemerintah Diminta Awasi Sektor Migas Secara Cermat



Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM untuk mengawasi sektor migas secara cermat.

“Intinya bahwa saat pemeriksaan akhir volume yang kon-

sentrat yang diekspor Newmont dan spesifikasi daripada konsentrat tersebut tidak diawasi oleh Kementerian ESDM namun yang terjadi yang menentukan jumlah volume dan kandungan itu disurvei oleh surveyor yang bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan,” terangnya kepada Parlemen baru-baru ini.

Menurutnya, seharusnya surveyor itu membantu Kementerian teknis seperti ESDM kemudian Kementerian ESDM memberikan rekomendasi secara teknis kepada Kementerian Perdagangan. “Ini seakan-akan Kementerian ESDM dalam posisi pasif karena berada dalam Kementerian Perdagangan itu yang terjadi di Newmont,” jelasnya.

Dia mengatakan, saat ini persoalan Newmont menjadi menarik karena pada tanggal 18 Maret nanti, pemerintah akan memperpanjang atau tidak terkait relaksasi di sektor hilir karena kita menginginkan Newmont mematuhi UU Minerba.

Namun disisi lain, lanjutnya, Newmont diberikan kesempatan mengeksport konsentrat untuk menghindari pemutusan hubungan kerja di perusahaan itu. “Yang harus dilaku-

kan oleh Newmont pertama yaitu melakukan keseriusan dalam membangun Smelter baik yang dilakukan oleh pihak ketiga ataupun dibangun oleh Newmont. Bagi pemerintah Indonesia tidak ada masalah soal itu,”paparnya.

Terkait usulan masyarakat lokal untuk membangun Smelter di NTB, kata Satya, itu bisa saja dilakukan dengan memberikan jaminan bagi pihak swasta untuk membangun smelter serta memberikan pasokan konsentrat sehingga dapat diolah di Provinsi tersebut.

“PT Newmont harus menunjukkan keseriusan atau menaruh sejumlah dana kepada pemerintah sebagai bukti dalam mengembangkan Smelter atau kerjasama dengan pihak

swasta dan berkomitmen untuk memberikan pasokan kepada siapa saja yang berinventasi terkait smelter. itu seperti di Freeport satu dibangun di Papua oleh pihak ketiga dan di Gresik. Kalau 18 Maret tidak tercapai kesepakatan di stop dulu,”katanya.

Selain itu, katanya, muncul aspirasi daerah untuk meminta akses kapasitas listrik Newmont sebesar 5 MW untuk kebutuhan di Pulau Sumbawa. “Kita meminta supaya akses kapasitas kelebihan daya yang dipunya Newmont dijual kepada PLN sehingga menambah kapasitas di Pulau Sumbawa. Terakhir masalah Newmont yang menjadi koreksi pemerintah,” jelasnya. (Si) foto: iwan armanias/parle/hr

Menteri KP Dihimbau Tinjau Ulang Larangan Jaring Cantrang

Aturan larangan penggunaan alat tangkap ikan berupa cantrang dan pukat jaring yang diberlakukan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP), membuat imbas yang cukup berpengaruh bagi nelayan. Gelombang protes pun tak dapat dielakkan.

Demikian dikatakan Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro, saat dihubungi via telepon oleh Parlemen, Kamis (12/03/15). Ia mengungkapkan hal ini, usai melakukan pertemuan dengan masyarakat di Daerah Pemilihannya, Jawa Tengah, meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Selama masa reses yang akan berlangsung hingga 22 Maret ini, Agung mengaku aktif melakukan pertemuan dan menyerap aspirasi masyarakat di dapilnya.

“Kami menemukan permasalahan tentang kebijakan KKP yang mengeluarkan peraturan tentang larangan bagi nelayan untuk menggunakan jaring cantrang. Ini berimbas besar ke nelayan, seperti beberapa waktu lalu, sudah terjadi aksi besar-besaran di daerah Kabupaten Batang, terjadi blokade pemblokiran jalan oleh nelayan bahkan terjadi pembakaran-pembakaran,” jelas Agung.

Bahkan, tambah Politisi Golkar ini, menyusul protes juga nelayan dari daerah Tegal, Pantura hingga Brebes. Bahkan, para nelayan melakukan protes hingga memboikot pelabuhan.

“Kami menghimbau kepada Menteri Susi agar meninjau

ulang kebijakan tersebut. Menteri tidak melihat bagaimana kondisi kebutuhan nelayan di tingkat bawah, tiba-tiba mengeluarkan aturan yang melarang jaring cantrang. Padahal, dulu waktu saya menjadi Bupati Brebes, pemerintah pernah melarang jaring trawl, kemudian pemerintah menawarkan solusi menggunakan jaring cantrang, sekarang cantrang juga dilarang,” heran Agung.

Agung menyangkan kebijakan ini telah melukai hati para nelayan. Bahkan, hasil temuannya, imbas kebijakan ini bukan hanya dirasakan nelayan, tapi juga produsen tambang, bahan untuk membuat jaring cantrang. Tambang ini juga untuk keperluan dunia perkapalan.

“Penghasil tambang di dapil saya, saat ini mengalami kerugian miliaran rupiah. Pekerjaannya menganggur, tidak bisa bekerja lagi. Tambang yang sudah dipilin menjadi tambang kapal tambang yang jumlahnya banyak itu tidak bisa terkirim karena terhalang oleh kebijakan itu. Imbasnya banyak,” kata Agung.

Sebagaimana diketahui, mengeluarkan aturan larangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, seperti cantrang dan pukat jaring atau trawl, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 2/2015. Namun, khusus untuk pengguna cantrang di Jawa Tengah, saat ini Menteri Susi mengembalikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. (sf) foto: rizka/parle/hr



Anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro

Penyelesaian Begal Harus Integral

Aksi begal yang telah meneror masyarakat di sejumlah daerah di tanah air sebenarnya bukanlah tindak kejahatan baru. Begal adalah masalah lama terkait dengan masalah kemiskinan, beban ekonomi dan sekarang

ditambah jerat narkoba.

“Ini masalah lama ya kalau di Lampung, kalau di daerah lain mungkin baru. Tindakan tegas jelas perlu tapi tidak akan selesai dengan tindakan tegas saja. Ini persoalan perut dan

persoalan tradisi yang sudah lama berkembang disana. Jadi kalau bicara solusinya harus integral,” kata anggota Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf dalam dialog radio Bersama Wakil Rakyat kerja sama Pemberitaan Setjen



Anggota Komisi III DPR RI Al Muzammil Yusuf

DPR dengan RRI Pro3 di Jakarta, Jumat (6/3/15).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Lampung ini menyebut ada persoalan tradisi yang sudah lama berkembang di sana, kekerasan, perkelahian bahkan tidak jarang berujung pembunuhan sudah biasa. “Di kampung orang tua saya perkelahian bunuh-bunuhan sudah biasa dengan tetangganya karena akar budaya menyelesaikan sesuatu dengan kekerasan, menempatkan har-

ga diri seperti itu,” tuturnya.

Menurutnya solusi integral itu mencakup aspek pendidikan, aspek religius, ekonomi dan membangun dialog budaya dengan masyarakat setempat. Selama ini upaya ini belum dilakukan konsisten bahkan tidak jarang ada oknum aparat yang memanfaatkan begal untuk keuntungan pribadi.

Maraknya narkoba juga membuat sejumlah pemuda terjerat. Sebagian terilit hutang dengan bandar narkoba

atau melakukan aksi begal untuk mengatasi sakau karena sudah kecanduan narkoba. “Ada laporan yang saya terima pelaku begal sebagian terilit narkoba, ketika mereka sakau apapun akan mereka lakukan,” ungkap dia.

Politisi Fraksi PKS ini menyebut keberhasilan seorang Kapolres yang berhasil membangun dialog dan pemahaman baru dengan mendekati tokoh masyarakat setempat. Pada saat itu kejahatan menurun namun pendekatan ini tidak dipertahankan ketika terjadi mutasi pejabat.

Sebagai anggota dewan Muzammil mengaku terus meyakinkan sejumlah pihak tentang solusi mengatasi permasalahan ini. Dalam masa reses kali ini, ia juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak di Provinsi Lampung membahas soal ini diantaranya dengan Pemda setempat dan Kapolda.

“Tahun 2012 lalu saya pernah mengusulkan agar Polri menambah seribu anggota Brimob di Lampung dan meminta Kapolri untuk menaikkan grade Polda Lampung dari tipe B menjadi tipe A. Kebijakan itu akan meningkatkan jumlah aparat sehingga pengawasan keamanan bisa diefektifkan, tetapi belum terealisasi,” demikian Muzammil. (nd/dt/iky) foto: naefurodji/parle/hr

BPIH Berpotensi Turun Enam Juta-an

Selain melakukan pengawasan terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji, diungkapkan Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay, ada *point* penting lainnya yang ikut diusung Tim Panja Haji Komisi VIII saat keberangkatannya ke tanah suci 15-21 Maret mendatang, yakni upaya kemungkinan penurunan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), namun tetap dapat meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji

“Saat reses Panja BPIH Komisi VIII tetap bekerja dan menemukan potensi penurunan BPIH sekitar 590 Dolar Amerika atau sekitar enam jutaan,” ungkapnya.

Selain itu ditambahkan Saleh pihaknya juga menemukan potensi efisiensi lain yang bisa berdampak pada penurunan BPIH, misalnya dengan mengurangi hari pelaksanaan ibadah haji dari 40 hari menjadi 30 hari. Hal ini tentunya akan dapat mengurangi segala biaya saat di tanah suci.

Tidak hanya itu, potensi efisiensi BPIH juga bisa dilakukan dengan perubahan rute perjalanan Jemaah haji. Jika sebelumnya perjalanan Jemaah dari In-

donesia menuju Jeddah terlebih dahulu baru kemudian ke Madinah. Hal ini sejatinya inefisiensi dan cukup merepotkan mengingat karena perjalanan dari Jeddah ke Madinah membutuhkan sekitar 7-8 jam perjalanan darat.

Di tahun ini rute perjalanan akan di balik dari Indonesia langsung menuju Madinah baru kemudian ke Jeddah, dan kembali ke tanah air melalui Bandar udara di Jeddah. Rute terbaru ini selain lebih efisien, juga tidak akan merepotkan jemaah haji. Dengan berbagai potensi efisiensi tersebut, Saleh meyakini akan mendesak pemerintah untuk dapat menurunkan BPIH dari tahun sebelumnya.

“Kami akan terus berupaya agar pemerintah bisa menyisir ulang potensi efisiensi yang ditemukan Panja tersebut, agar BPIH tahun ini bisa turun minimal tiga jutaan. Karena terus terang target kami minimal bisa turun tiga jutaan rupiah. Namun ternyata Panja menemukan potensi turun lebih dari itu, yaitu sekitar enam juta rupiah, semoga ini bisa terwujud,” tutup Saleh. (Ayu), foto: andri/parle/hr



Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay

Komisi VIII Pastikan Calhaj Terlayani Dengan Baik

Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII akan mengawasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2015 yang telah dilakukan pemerintah Indonesia di Tanah suci. Hal ini semata untuk memastikan pelayanan terbaik yang akan diberikan pemerintah kepada para calon jemaah haji Indonesia.

Keberangkatan Panja ke tanah suci akan dibagi dalam dua Tim. Tim Pertama akan berangkat pada 15-21 Maret 2014. Dijelaskan Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay, Tim Pertama akan mengawasi berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia di tanah suci.

“Kami ingin mengecek persiapan Pemerintah RI dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, sekaligus memastikan sekitar 168.800 calon jemaah haji bisa terlayani dengan baik. Jadi keberangkatan kami ke tanah suci nanti semata untuk menjalankan salah satu tugas dan fungsi dewan, yakni pengawasan. Bukan untuk jalan-jalan atau ibadah,” tegas Saleh kepada wartawan di ruang Pimpinan Komisi VIII, Senin (9/3).

Dijelaskan Saleh, sebelumnya Komisi VIII telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Agama, dan Dirjen Haji yang memaparkan segala persiapan pelaksanaan ibadah haji dari pemondokan, katering dan transportasi, termasuk kesiapan transportasi di bandara tanah suci baik yang di Madinah, maupun Jeddah.

Bahkan dikatakan Saleh, Menag sempat berjanji bahwa tahun ini jarak pemondokan jemaah haji Indonesia tidak akan lebih dari 4,5 Km jauhnya dari Masjidil Haram, dan untuk pe-

mondokan yang berjarak 4,5 Km ada transportasi lokal yang akan mengantarkan jemaah haji dari Pemondokan ke Masjidil Haram. Terkait hal tersebut Panja Komisi VIII akan memastikan kebenaran janji pemerintah tersebut.



Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay

Sebagaimana diketahui tahun lalu ada sekitar 40 Kloter yang dijanjikan ditempatkan di luar Markaziyah. Walaupun pemerintah berjanji akan mengembalikan uang jemaah haji atas kelalaiannya tersebut, namun sejalatnya bukan hal itu yang diharapkan oleh jemaah haji. Jauh lebih penting dari pengembalian uang itu adalah bagaimana jemaah haji mendapat pelayanan dan kenyamanan dalam beribadah haji yang mungkin hanya dilakukan sekali dalam seumur hidupnya.

Tidak Ikut Campur Tender Haji

Tim Panja BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) Komisi VIII DPR RI gelombang dua akan berangkat ke tanah suci

pada 5-11 April 2015. Tugas Tim kedua Panja dikatakan Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay tidak lain untuk memastikan apakah rekomendasi dari Tim Panja BPIH yang pertama sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah atau belum.

“Walaupun mengawasi dan melakukan rekomendasi terhadap hasil investigasi langsung ke lapangan, namun DPR dalam hal ini Komisi VIII tidak akan ikut campur menentukan tender terhadap perusahaan yang akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan ibadah haji. Hal itu sepenuhnya menjadi hak dan wewenang Pemerintah (Kementerian Agama) selaku operator penyelenggaraan ibadah haji,” jelas Politisi dari Dapil Sumut II ini.

Meski demikian ditambahkan Saleh, pihaknya tentu tidak akan membiarkan perusahaan di Arab Saudi yang telah melakukan wanprestasi atau lalai dalam menjalankan kewajibannya di pelaksanaan ibadah haji tahun sebelumnya kembali disertakan pada tahun ini. Hal tersebut semata untuk memberikan sanksi dan efek jera kepada perusahaan tersebut, sekaligus memastikan bahwa pemerintah akan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada calon jemaah haji mendatang.

Saleh menegaskan bahwa dalam melakukan pengawasan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, pihaknya sama sekali tidak menggunakan anggaran atau dana dari pemerintah. Melainkan anggaran yang berasal dari DPR RI sebagaimana amanat yang tercantum dalam undang-undang. (Ayu) foto: iwan armanias/parle/hr



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya menerima Tim Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina), Selasa (10/03) Foto: Denus/Parle/HR



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Armenia untuk Indonesia Anna Agha Djanian di Gedung Nusantara III DPR RI, Jumat (13/03) Foto: Iwan Armanias/Parle/HR



Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi DPR RI membahas DPR menuju Parlemen Modern, Selasa (10/02) Foto: Iwan Armanias/Parle/HR



Sosialisasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dibuka oleh Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti, Kamis (12/03) Foto: Naefurodji/Parle/HR

